

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rekonstruksi Hukum

1. Pengertian Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁸

Dalam *Black Law Dictionary*,⁹ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942, Akses 16 September 2018.

⁹ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 16 September 2018

¹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469, Akses 16 September 2018.

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.¹¹

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹²

¹¹ <http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*. Akses 16 September 2018.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153, Akses 23 September 2018.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

B. Konsep Tentang *Whistleblower*

1. Pengertian *Whistleblower*

Terminologis *whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran.

Sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).¹³

Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.

Apabila dikontekstualisasikan di Indonesia, bisa dianalogikan sebagai “pemukul kentongan”, dimana pemukulan kentongan aparat pengamanan tradisional (patroli keliling) memberikan tanda pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu peristiwa baik berupa kejahatan (pencurian, perampokan, dll) maupun bencana (kebakaran, banjir, dll).

¹³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1. Akses 23 September 2018.

Oleh karena itu berdasarkan kedua konotasi (peniup peluit atau pemukul kentongan) tersebut dapat dikatakan bahwa *whistleblower* identik dengan pengungkap fakta atau pembocor rahasia dari suatu peristiwa kejahatan.

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik.

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.¹⁴

Menurut Mulyana Wirakusumah,¹⁵ *whistleblower* sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*.

Para *whistleblower* bukan sekadar ‘tukang mengadu’ akan tetapi saksi suatu kejahatan. Beberapa lembaga seperti KPK sudah mengembangkan sistem *online* pelaporan *whistleblower*, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga mengembangkan *whistleblower System*.

Whistleblower merupakan orang dalam Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain yang memiliki akses informasi dan mengadakan perbuatan terindikasi penyimpangan.

2. Syarat dan Jenis-Jenis *Whistleblower*

¹⁴ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, 2011, hlm. Ix, Akses 23 September 2018.

¹⁵ Buletin Kesaksian, Edisi 2 Tahun 2012, Akses 23 September 2018.

Imam Thurmudhi, berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai *whistleblower* pada dasarnya adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana atau pelanggaran, sehingga dengan itikad baik mengungkapkan kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang.¹⁶

Namun demikian penilaian itikad baik yang dimaksudkan disini memiliki nilai yang sangat subyektif, bisa saja ada niat atau kepentingan tertentu yang mendasari pengungkapan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower*. Dengan perhitungan untung rugi dari pengungkapan tersebut bisa saja seseorang terdorong untuk menjadi *whistleblower*.¹⁷

Floriano C. Roa menyebutkan beberapa jenis *whistleblower*, yaitu:¹⁸

1. *Internal whistle blowing occurs within the organization. It is going "over the head of immediate supervisors to inform higher management of the wrongdoing".* (Peniup peluit internal dilakukan dalam organisasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas sebagai supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemen atasannya).
2. *External whistle blowing occurs outside the organization. It is revealing illegal and immoral activities within the organization to outside individuals or groups, regulatory body or non-government organizations.* (Peniup eksternal dilakukan di luar organisasi. Peniup peluit membuka kegiatan ilegal atau kegiatan immoral dalam suatu organisasi yang disampaikan kepada individu atau kelompok di luar organisasi tersebut, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat).

¹⁶ Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, h. 30, Akses 23 September 2018.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, h. 59, dalam Floriano C. Roa, 2007, *Business Ethics and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition, Manila, h. 145, Akses 23 September 2018.

3. Peran *Whistleblower*

Perkembangan modus tindak pidana kejahatan korupsi di negeri kita akhir akhir ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih. Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional.

Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganismya praktik korupsi tersebut maka diperlukan peran *whistleblower* yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relative lebih mudah untuk dibongkar.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan suatu gosip bagi pengungkapan korupsi maupun mafia peradilan.

Yang dikatakan *whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan hanya sekedar sebagai rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *whistleblower* harus hati-hati ketika menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus di uji dahulu.

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam disebut institusi dimana di tenggarai atau dicurigai telah terjadi praktek korupsi.

Sebagai orang dalam, seorang *whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi dimana dia bekerja. Seorang

whistleblower ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut.

C. Konsep Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*".

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Moeliatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67. Akses 25 September 2018.

²⁰ Ibid, hal. 71.

Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹

Pengertian asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata kroupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu juga berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin dalam bahasa latin juga, namun bahasa yang lebih tua. Kemudian dari bahasa latin tersebutlah selanjutnya turun ke banyak bahasa eropa misalnya seperti inggris, yaitu *corruption*, Perancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korrupatie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan kemudian menjadi bahasa Indonesia, yaitu korupsi²².

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam ruang lingkup hukum Indonesia yaitu pada Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

²¹ Ibid.

²² Dr. Ermansjah Djaja, S.H, M.Si., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23, Akses 5 November 2018.

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan: “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.²³

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.²⁴

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu.²⁵

- 1.) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00;
- 2.) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

²³ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 11, Akses 25 September 2018.

²⁴ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4, Akses 25 September 2018.

²⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kemudian dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah:

- a.) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan tujuan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukannya;
- b.) Memberi hadiah atau janji dengan mengingati kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya;
- c.) Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;
- d.) Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- e.) Memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f.) Sengaja membiarkan perbuatan curang; dan
- g.) Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif adalah :

- a.) Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat;
- b.) Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang;
- c.) Menerima pemberian hadiah atau janji;
- d.) Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu; dan
- e.) Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:²⁶

- a. Perbuatan yang merugikan Negara

Perbuatan merugikan Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

²⁶ KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, 2006, Akses 25 September 2018.

1.) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap-menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan ini di atur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, dan pasal 13.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, yaitu pada pasal 9 dan pasal 10 huruf a, b, c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1.) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a.) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b.) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian

dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, pasal 7 ayat (2), dan pasal 12 huruf h.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Konsep Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakkan hukum agar tidak terjadi ketimpangan.

Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari system kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:²⁷

- 1.) Substansi hukum, merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun;
- 2.) Struktur hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim; dan
- 3.) Budaya hukum, merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai:

Perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁸

²⁷ Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, [Http.www.sribd.com](http://www.sribd.com), akses 6 Oktober 2018.

²⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm.55.

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”³³

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

³² Ibid.

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38.

³⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan Kepastian Hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Perlindungan Hukum *Whistleblower*

Dalam sistem pradilan pidana di Indonesia, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower* bersifat represif. Bentuk perlindungan represif ini meliputi perlindungan hukum yang diberikan terhadap *whistleblower* dalam segi antisipasi dari segala tindakan atau resiko yang tidak diinginkan.

Hal ini sesuai dengan esensi buku karya Mudakkar bahwa perlindungan yang diberikan negara antara lain represif dan preventif. Perlindungan yang diberikan dalam bentuk secara yuridis maupun fisik.³⁵

³⁵ Dian Eka Kusuma Wardani, *Perlindungan Hukum Terhadap para pelaku Whistleblower Pada TindakPidana Korupsi*, Jurnal Al-daulah Vol. 6 No. 2, Hal. 292, Akses 7 Oktober 2018.

Sistem perlindungan antisipasi atau represif dengan memanfaatkan lembaga atau badan yang telah ada melalui penambahan bahkan menguatkan fungsi dan kewenangan dari lembaga tersebut. Butuh suatu terobosan sebagai model perlindungan baik pada saksi dan korban terutama *whistleblower*. Suatu aktivasi lembaga ini sudah di nanti-nanti agar mampu memfasilitasi perlindungan bagi *whistleblower*.³⁶

Atas nama suatu badan yang memiliki suatu AD/ART tersendiri dan tidak patut jika dilakukan suatu intervensi pada lembaga tersebut. *Good governance* sebagai asas yang merupakan dasar dalam menjalankan tugas dan kordinasi dari seluruh lembaga bahwa tidak diperbolehkan suatu lembaga melakukan intervensi pada lembaga lain.

Untuk itu sebagai suatu lembaga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menggunakan hak dan wewenangnyanya untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi *whistleblower*.³⁷

Di sisi lain model koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan instansi lain dalam memberikan perlindungan hukum dapat digunakan sebagai upaya preventif agar mampu menciptakan instrumen guna mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam kedudukan *whistleblower*.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi dasar agar tercipta koordinasi yang harmonis demi kepentingan negara sebagai kebutuhan publik. Dari sinergitas tersebut dapat dihasilkan suatu program maupun kebijakan lembaga agar menciptakan suatu pembebasan dalam pertanggungjawaban pidana yang dipikul (suatu kondisi ketika *whistleblower* tersangkut kasus dimana ia juga menjadi saksi pengungkap fakta).³⁸

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., hal. 293.

³⁸ Ibid.

Jenis koordinasi lain melalui lembaga representasi masyarakat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu menempatkan klausula pengaturan seperti di atas atas *binding power* atau memiliki kekuatan hukum mengikat ketika aturan yang demikian semakin dikembangkan oleh badan representatif masyarakat.

Bahwa *whistleblower* bukanlah seorang saksi maka pengaturannya harus secara khusus dengan diaplikasikan pada kewenangan LPSK. Dengan begitu tercipta suatu aturan yang lebih tinggi karena dihasilkan oleh lembaga yang memiliki suara atas nama rakyat.³⁹

Jenis instrumen yang dapat dihasilkan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan lembaga lain misal Kejaksaan, melalui Kejaksaan Agung memunculkan suatu kebijakan guna melindungi status *whistleblower*. Aplikasinya berupa pembuatan ketentuan peraturan yang berisi penempatan *whistleblower* sebagai bagian dari penuntut umum atau dari pihak kejaksaan.

Sehingga demi kelangsungan tugas dan keberhasilan mengungkap suatu kejahatan serta diperoleh pertanggungjawaban dari diri pelaku maka dalam aturan tersebut dimunculkan kekebalan hukum atau *legal immunity* dari segala upaya hukum yang ditujukan padanya.

³⁹ Ibid.

Dalam ketentuan tersebut juga dicantumkan batasan perlindungan hukum yang diberikan oleh keduanya, agar tidak timbul suatu *chaos* ketika terbit seorang *whistleblower* dengan segala ancaman yang ditujukan.⁴⁰



⁴⁰ Ibid.